

# Mediasi Tiongkok dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Iran-Arab Saudi 2023

**Abdullah**

Universitas Brawijaya  
Indonesia

e-mail: [a.assegaf@ub.ac.id](mailto:a.assegaf@ub.ac.id)

## **ABSTRACT**

*The bilateral relations between Saudi Arabia and Iran are characterized by turmoil. Tensions reached a peak in 2016 with the execution of Nimr Al-Nimr, a Shia cleric, which sparked the arson of the Saudi Arabian embassy in Iran and severed diplomatic relations between the two countries. This conflict is rooted in differences in political views that have caused regional polarization and geopolitical instability in the Middle East, as well as having an impact on global economic stability related to oil supplies. Even though other countries' diplomatic efforts failed, the People's Republic of China (PRC) succeeded in becoming a mediator in normalizing relations between Saudi Arabia and Iran in 2023. China plays an important role as a mediator in efforts to reduce tensions between Iran and Saudi Arabia. This article examines the mediator role played by China during the dispute resolution process in diplomatic relations between the two countries. In this process, China succeeded in facilitating dialogue between the two countries, focusing on strategies, goals, interests and challenges faced during the mediation process. Research findings show that China's involvement contributed significantly to building trust between countries in conflict, thereby successfully convincing both parties to normalize diplomatic relations.*

**Keywords: Arab Saudi, Iran, Mediation, Normalization, China**

## **ABSTRAK**

*Hubungan bilateral Arab Saudi dan Iran diwarnai oleh gejolak yang cenderung terlihat sebagai persaingan dan konflik. Ketegangan mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan eksekusi Nimr Al-Nimr, seorang ulama Syiah, yang memicu pembakaran terhadap kedutaan Arab Saudi di Iran dan memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Konflik ini berakar pada perbedaan pandangan politik yang menyebabkan polarisasi regional dan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, serta berdampak pada stabilitas ekonomi global terkait pasokan minyak. Meskipun upaya diplomatik negara-negara lain gagal, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berhasil menjadi mediator dalam normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023. Tiongkok memainkan peran penting sebagai mediator dalam upaya meredakan ketegangan antara Iran dan Arab Saudi. Artikel ini menelaah peran mediator yang dijalankan Tiongkok selama proses penyelesaian sengketa dalam hubungan diplomatik kedua negara. Dalam proses tersebut Tiongkok berhasil memfasilitasi dialog antara kedua negara tersebut, dengan fokus pada strategi, tujuan, kepentingan dan tantangan yang dihadapi selama proses mediasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Tiongkok berkontribusi secara signifikan dalam membangun kepercayaan antar negara yang berkonflik, hingga berhasil meyakinkan kedua belah pihak untuk menormalisasi hubungan diplomatik.*

**Kata Kunci: Arab Saudi, Iran, Mediasi, Normalisasi, Tiongkok**

## **Pendahuluan**

Arab Saudi dan Iran telah mengalami hubungan pasang surut selama lebih dari empat dekade. Ketegangan ini berawal dari adanya revolusi yang terjadi di Iran pada tahun 1979, hal ini membuat Kerajaan Saudi merasa terancam karena legitimasi Arab Saudi pada Islam menjadi tergerus. Konflik ini dapat dikatakan muncul disebabkan karena adanya perebutan hegemoni di Timur Tengah. Arab Saudi dan Iran ingin menyebarkan secara luas pengaruhnya di Timur Tengah. Salah satu hambatan terbesar dalam mendamaikan hubungan Arab Saudi dengan Iran adalah adanya pandangan politik yang berbeda antara kedua negara, Arab Saudi mewakili kelompok Pragmatis Pro Barat, sedangkan Iran mewakili kelompok Fundamentalis Anti Penjajahan dan mengedepankan kesetaraan dalam hubungan diplomatik. Selain itu, ketegangan ini juga seringkali tidak lepas dari campur tangan negara adikuasa yang turut melakukan intervensi terhadap konflik timur tengah. Hal ini menyebabkan hubungan buruk antara Arab Saudi dan Iran terus berlanjut sampai pada akhirnya di tanggal 10 Maret 2023, diberitakan tercapainya normalisasi hubungan diplomatik antara Iran dengan Arab Saudi setelah mencapai puncak konflik sejak 2016.

Tiongkok menjadi negara yang memiliki peran besar dalam mewujudkan normalisasi hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh Tiongkok yaitu relasi hubungan negara yang baik dengan Iran memberikan poin tambahan untuk kemajuan normalisasi antara kedua negara tersebut (Aprilia, 2023). Hubungan Tiongkok dengan Iran dibuktikan dengan adanya kesepakatan kemitraan strategis antara Tiongkok dengan Iran selama 25 tahun, sedangkan hubungan Tiongkok dengan Arab Saudi terjalin karena Tiongkok menjadi importir minyak terbesar dari Arab Saudi. Pada satu sisi Tiongkok diuntungkan kepentingannya dalam sektor energi terhadap Arab Saudi, dan pada sisi lain Tiongkok dapat menyelaraskan salah satu koridor The Belt and Road Initiative melalui Iran (Farid & Lovely, 2023). Kepentingan ini dapat menjadi alasan sah keputusan Tiongkok untuk menjadi perantara dalam proses normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Tiongkok terus berusaha dalam menjaga stabilitas kedua negara tersebut. Singkatnya, jika perselisihan antara Arab Saudi dan Iran dibiarkan berlanjut, jelas bisa menjadi hambatan bagi Tiongkok untuk memperluas pasarnya di Timur Tengah (Davinia, 2023).

Oleh karena itu, penulis melihat adanya isu yang menarik untuk diteliti karena adanya kebijakan luar negeri Tiongkok yang tidak biasa, mengingat Tiongkok cenderung focus pada isu ekonomi namun kali ini menjadi aktor utama dalam penyelesaian sengketa hubungan diplomatik yakni mediasi antara Arab Saudi dan Iran yang sebelumnya gagal dilakukan oleh Irak dan Oman. Tulisan ini akan membahas pada bagaimana proses Tiongkok dalam pendekatan diplomatic sebagai mediator dalam normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi-Iran. Selain itu bagaimana peran ini diambil untuk menciptakan Kawasan timur tengah yang lebih kondusif untuk menunjang kepentingan nasional Tiongkok di Kawasan ini.

## **Metode**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menginvestigasi keadaan atau karakteristik kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa saat ini. Tujuannya adalah untuk menghasilkan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang sedang diteliti (Sugiyono, 2017). Dari penelitian yang penulis lakukan, bentuk variabel independen yang ditetapkan adalah peran Tiongkok sebagai mediator, sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah normalisasi hubungan diplomatik Arab

Saudi dan Iran. Untuk metode penelitian, penulis akan menggunakan penelitian jenis kualitatif. Dalam bukunya yang berjudul *Research Methods In International Relations*, menurut Christopher Lamont metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang secara umum lebih mengarah kepada pengumpulan data dan strategi analisis dengan mengandalkan data non numerik atau penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan prosedur atau cara lain dari kuantifikasi (Lamont, *Research Methods in International Relations*, 2015). Metode ini digunakan dalam penelitian dengan alasan untuk membantu memberikan penjelasan mengenai negara ketiga Tiongkok yang menjadi mediator dalam normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran.

### **Tekanan Internasional Akibat Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran**

Pengembangan program tenaga nuklir Iran yang dimulai pada dekade 1980-an memicu kecurigaan dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, bahwa program tersebut bertujuan untuk memproduksi senjata nuklir (Abdillah, 2019). Pemerintah Iran merespons dengan menegaskan bahwa tujuan program nuklirnya bersifat damai dan untuk kepentingan sipil. Namun, kecurigaan komunitas internasional semakin menguat setelah pada tahun 2002 diumumkan bahwa Iran telah menguasai seluruh rantai siklus bahan bakar nuklir, mulai dari penambangan, penggilingan, konversi, hingga pengayaan uranium, dan bahkan memiliki 20.000 unit sentrifugal uranium yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembuatan senjata nuklir (Irawan, 2021).

Sebagai tanggapan, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi kepada Iran. Sanksi tersebut mencakup embargo perdagangan serta pembatasan terhadap individu, perusahaan, lembaga keuangan, dan institusi militer yang terkait dengan pengembangan program nuklir Iran (Joyner, 2016). Tujuan utama sanksi ini adalah memaksa Iran untuk kembali ke meja perundingan dan menyetujui transparansi serta pembatasan terhadap aktivitas nuklirnya.

Setelah lebih dari satu dekade berada di bawah tekanan sanksi, pada tahun 2015 Iran bersama lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman menyetujui *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*. Kesepakatan ini dicapai pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama dan Presiden Hassan Rouhani, dan dirancang untuk memastikan bahwa pengembangan nuklir Iran hanya digunakan untuk tujuan damai selama sepuluh tahun ke depan (Islamic Republic News Agency, 2015). JCPOA mencakup lima elemen utama yaitu batasan pengayaan uranium, kapasitas produksi, stok uranium, jumlah plutonium, dan pengawasan internasional (Joyner, 2016). Sebagai imbalannya, Amerika Serikat menyetujui pelonggaran sebagian besar sanksi ekonomi terhadap Iran.

Namun demikian, pada tahun 2018, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian JCPOA. Pemerintah AS menilai bahwa kesepakatan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak cukup kuat untuk menahan ambisi nuklir Iran dalam jangka panjang. Oleh karena itu, AS menuntut adanya perjanjian baru yang lebih komprehensif (Krismayanti, 2023). Selain menghentikan partisipasi dalam JCPOA, AS juga kembali memberlakukan sanksi ekonomi dengan cakupan lebih luas, termasuk sanksi ekstrateritorial yang menargetkan ekspor minyak Iran (Rahmadanti, 2021).

Tindakan ini menyebabkan ketegangan meningkat secara signifikan. Serangkaian insiden seperti serangan terhadap kapal tanker di Teluk Oman pada pertengahan 2019 dan penembakan pesawat nirawak milik AS oleh militer Iran memperburuk hubungan kedua negara (Diasih, 2022). Puncak dari eskalasi ini terjadi pada 3 Januari 2020, ketika serangan udara AS menewaskan Komandan Garda Revolusi Iran, Jenderal Qassem Soleimani, di Baghdad (Abdul & Karam, 2020).

Dampak dari sanksi ekonomi tersebut sangat terasa terhadap perekonomian Iran. Sektor ekspor minyak sebagai tulang punggung ekonomi Iran mengalami penurunan drastis karena sanksi AS mempersulit negara-negara lain untuk menjalin hubungan dagang dengan Teheran. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Iran anjlok pada 2018–2019, dan nilai mata uang nasional Iran merosot tajam (CNBC Indonesia, 2019; DW, 2019). Selain itu, sanksi juga menyebabkan Iran kesulitan mengimpor bahan pangan dan kebutuhan dasar karena mata uang lokal kehilangan daya beli di pasar internasional (DW, 2020).

Isolasi politik dan ekonomi yang semakin parah mendorong Iran untuk mengupayakan strategi baru dalam memperbaiki citra dan posisinya di mata dunia. Salah satu strategi tersebut adalah dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, yang selama ini menjadi sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi Iran untuk memperluas akses perdagangan minyak dan memperoleh kembali kepercayaan komunitas internasional (CNBC Indonesia, 2023). Rekonsiliasi dengan Arab Saudi menjadi penting tidak hanya secara simbolis, tetapi juga secara strategis, karena dapat membantu Iran mengurangi tekanan ekonomi global dan memperluas jejaring diplomatiknya.

### **Kepentingan Ekonomi Iran dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Arab Saudi**

Iran merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor minyak bumi, gas alam, dan cadangan uranium yang besar. Potensi ini seharusnya menjadi kekuatan utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai respons terhadap program pengembangan nuklir Iran justru menghambat akses Iran dalam pasar energi global (DW, 2019). Meskipun pemerintah Iran menegaskan bahwa pengembangan nuklir dilakukan untuk kepentingan sipil, seperti penyediaan energi listrik nasional, negara-negara Barat tetap menyangsikan intensi Iran, terutama setelah terungkapnya aktivitas pengayaan uranium dalam skala besar (Irawan, 2021).

Sanksi ekonomi tersebut menyebabkan dampak serius terhadap ekonomi domestik Iran. Laporan *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perekonomian Iran menyusut sekitar 10% dibandingkan tahun 2017. Selain itu, Iran juga menghadapi inflasi tinggi mencapai 35,7%, yang berdampak pada melonjaknya harga kebutuhan pokok dan meningkatnya angka pengangguran (DW, 2019). Kondisi ini memaksa pemerintah Iran untuk mencari alternatif strategis guna menghidupkan kembali perekonomian nasional, salah satunya melalui upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Arab Saudi.

Dalam konteks ekspor minyak, Arab Saudi memiliki posisi strategis sebagai sesama negara penghasil minyak dan anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Kerja sama Iran dengan Arab Saudi dalam sektor energi diharapkan mampu membuka kembali jalur perdagangan minyak Iran yang selama ini dibatasi oleh sanksi AS. Terlebih, kondisi geopolitik global yang tidak stabil, termasuk konflik bersenjata di

beberapa wilayah, menyebabkan berkurangnya pasokan minyak dan mendorong naiknya harga di pasar internasional (VOA Indonesia, 2022). Situasi ini membuka peluang bagi Iran untuk mendapatkan keuntungan ekonomis melalui ekspor energi yang lebih luas apabila hubungan dengan Arab Saudi membaik.

Selain sektor energi, Iran juga memiliki potensi ekonomi yang besar dalam bidang pertanian, pariwisata, dan manufaktur. Namun, depresiasi nilai tukar mata uang Iran akibat sanksi menyebabkan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan menolak melakukan impor produk pertanian dari Iran (DW, 2020). Oleh karena itu, Iran perlu memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, untuk memperluas pasar ekspor produknya. Iran dikenal dengan hasil pertanian utama seperti gandum dan beras, yang dapat melengkapi kebutuhan pangan negara-negara Arab yang lebih mengandalkan komoditas seperti kurma dan kopi (Ilmu Demografi, 2018).

Normalisasi hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi juga membuka kembali kemungkinan kerja sama di sektor mobilitas dan layanan keagamaan. Putusnya hubungan kedua negara sejak 2016 menyebabkan warga Arab Saudi tidak memiliki akses langsung untuk bepergian ke Iran, terutama karena Iran menutup akses jalur darat menuju negara tetangga tersebut. Dengan membaiknya hubungan diplomatik, hambatan mobilitas tersebut dapat diatasi dan membuka peluang kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi jemaah asal Iran (Rafsanjani, 2022). Hal ini tentu akan berdampak positif bagi hubungan sosial-ekonomi kedua negara serta meningkatkan stabilitas kawasan.

Dengan demikian, normalisasi hubungan antara Iran dan Arab Saudi memiliki signifikansi yang besar, tidak hanya dalam konteks politik dan keamanan, tetapi juga dalam aspek ekonomi. Kerja sama bilateral ini dapat menjadi solusi pragmatis bagi Iran dalam menghadapi tekanan ekonomi global serta membuka jalan menuju integrasi yang lebih kuat di kawasan Timur Tengah.

### **Stabilitas Kawasan Timur Tengah Pasca Normalisasi Hubungan Iran-Arab Saudi**

Sejumlah konflik di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir tidak terlepas dari keterlibatan dua kekuatan regional utama: Iran dan Arab Saudi. Salah satu konflik yang paling mencolok adalah konflik di Suriah, di mana Iran memberikan dukungan kepada rezim Bashar al-Assad sejak awal meletusnya konflik tersebut. Dukungan ini didasarkan pada hubungan strategis antara Iran dan Suriah yang telah terjalin sejak 1982, serta sebagai bagian dari upaya Iran untuk menghindari isolasi politik dari negara-negara Arab (Tjandra, 2018).

Konflik Suriah bermula dari gelombang protes rakyat terhadap kepemimpinan Bashar al-Assad yang dianggap otoriter dan gagal dalam mengatasi persoalan korupsi, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Ketidakpuasan rakyat berkembang menjadi demonstrasi besar-besaran yang kemudian berubah menjadi perang saudara. Ketika pemerintah Suriah menggunakan kekuatan militer, termasuk senjata kimia, terhadap demonstran, kecaman internasional pun meluas (Nurrochim, 2021).

Perselisihan ini semakin kompleks karena faktor sektarian: Arab Saudi mendukung kelompok oposisi yang mayoritas Sunni, sementara Iran mendukung pemerintah Assad yang beraliran Syiah dengan mengerahkan pasukan dan penasihat militer dari *Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)*, serta mendukung milisi Hizbullah (Fahham & Kataatmaja, 2014). Di sisi lain, Arab Saudi memberikan dukungan dalam bentuk dana

dan logistik kepada kelompok oposisi dengan tujuan membendung pengaruh Iran di kawasan (Maulana, 2018).

Konflik lainnya yang memperlihatkan rivalitas Iran dan Arab Saudi adalah konflik di Yaman. Konflik ini dipicu oleh penghapusan subsidi bahan bakar oleh pemerintah Yaman pada tahun 2014 yang memicu protes besar dan memunculkan kelompok Houthi yang beraliran Syiah sebagai oposisi utama terhadap Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi (Kamaliya, 2020). Ketika kelompok Houthi berhasil merebut ibu kota Sanaa dan terus meluaskan kekuasaannya ke wilayah lain seperti Ibb dan pelabuhan Hodeidah, Iran dituduh memberikan dukungan militer dan persenjataan kepada kelompok tersebut karena kesamaan keyakinan agama (Tempo.co, 2019).

Sebagai tanggapan, Presiden Hadi meminta bantuan militer dari Arab Saudi, yang menganggap kelompok Houthi sebagai ancaman serius terhadap legitimasi pemerintah Yaman dan stabilitas kawasan. Saudi kemudian melancarkan kampanye militer bersama koalisinya untuk mendukung pemerintahan Hadi yang sah (Herlianto, 2022). Persaingan pengaruh antara Iran dan Saudi di Yaman menyebabkan konflik yang semula bersifat domestik berkembang menjadi konflik regional dengan konsekuensi kemanusiaan yang serius.

Keterlibatan aktif Iran dan Arab Saudi dalam dua konflik besar ini menunjukkan bagaimana rivalitas geopolitik keduanya turut memperpanjang konflik dan menciptakan instabilitas kawasan. Namun, setelah tercapainya kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara pada tahun 2023, terdapat harapan besar terhadap perbaikan kondisi kawasan. Salah satu poin penting dari normalisasi tersebut adalah komitmen Iran untuk menghentikan dukungan militer kepada kelompok Houthi, yang diharapkan dapat meredakan ketegangan di Yaman (Republika.co.id, 2023).

Langkah rekonsiliasi ini dinilai sebagai pendekatan baru yang dapat menyelesaikan akar permasalahan di berbagai konflik regional. Dengan membaiknya hubungan antara Iran dan Arab Saudi, kemungkinan terciptanya perdamaian juga terbuka untuk konflik-konflik lain seperti di Suriah dan Lebanon. Normalisasi ini menjadi langkah penting menuju stabilitas kawasan dan membuka ruang dialog yang selama ini terhambat oleh rivalitas politik dan keagamaan.

### **Normalisasi Hubungan Arab Saudi- Iran**

Periode antara tahun 2016 hingga 2023 menjadi tahun penting dalam transformasi hubungan Arab Saudi dan Iran. Seiring berjalannya waktu hubungan antara keduanya mengalami evolusi yang kompleks dan hal tersebut dipengaruhi oleh dinamika internal juga eksternal. Salah satunya adalah pemilihan presiden Iran pada tahun 2021, hal tersebut menjadi harapan dapat membawa dinamika baru dalam hubungan dengan Arab Saudi. Namun Arab Saudi menyayangkan bahwa belum ada keputusan yang bulat untuk kesepakatan nuklir Iran (Sorongan, 2021). Amerika dan Tiongkok turut menyoroti konflik ketegangan yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran. Kedua negara tersebut berinteraksi dengan konflik regional tersebut agar menurunkan tensi dan pengaruhnya pada stabilitas global. Melihat konflik yang sedang terjadi, pentingnya melihat upaya perdamaian dalam rangka normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Dalam pelaksanaan normalisasi pun tidak melakukan tindakan militer atau metode koersif apapun, melainkan dilakukan melalui adanya insentif teknologi dan kondisi yang kompleks.

Sebelumnya upaya perdamaian pernah dilakukan oleh pemerintah Iran dan Arab Saudi yang direncanakan oleh Menteri Luar Negeri Iran yaitu Javad Zarif melalui delegasinya pada tahun 2017 setelah melakukan ziarah haji di Arab Saudi, namun belum menemui titik terang perdamaian dua negara (Pomeroy, 2017). Setelah sebelumnya berbagai putaran upaya dilakukan antara Arab Saudi dan Iran untuk menemui titik perdamaian termasuk upaya yang disponsori oleh Irak dan Oman pada tahun 2021. Akan tetapi putaran yang telah dilakukan tidak memiliki dampak sebesar yang dilakukan oleh Ebrahim Raisi- Mohammad Bin Salman. Tiongkok sebagai salah satu negara yang ingin memiliki peran konstruktif dalam penyelesaian masalah hubungan negara melakukan langkah mediasi, menjadi mediator untuk konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh Tiongkok yaitu relasi hubungan negara yang baik dengan Iran dan Arab Saudi memberikan poin tambahan untuk kemajuan normalisasi antara kedua negara tersebut (Aprilia, 2023). Langkah yang dilakukan oleh Tiongkok memberikan tantangan geopolitik bagi Amerika Serikat di Timur Tengah. Pada satu sisi Tiongkok diuntungkan kepentingannya dalam sektor energi terhadap Arab Saudi, dan pada sisi lain Tiongkok dapat menyelaraskan salah satu koridor The Belt and Road Initiative melalui Iran (Farid & Lovely, 2023).



Gambar 1. Menlu Arab Saudi dan Iran di Beijing

Sumber: <https://www.reuters.com/world/foreign-ministers-iran-saudi-meet-china-2023-04-06/>

Pada akhirnya bulan Maret 2023, pertemuan yang ditengahi oleh Tiongkok mencapai kesepakatan setelah tujuh tahun hubungan Iran-Arab Saudi mencapai titik terendah dalam sejarah. Ditandai dengan komitmen antara kedua negara untuk membuka kembali kedutaan besar mereka di Teheran dan Riyadh pada bulan Mei 2023. Kesepakatan ini mencakup implementasi perjanjian kerjasama yang sebelumnya sudah ditandatangani pada tahun 2001 dan pakta 1998 untuk bersama meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, dan budaya (United State Institute of Peace, 2023). Setelah serangkaian perundingan, pada kesempatan tersebut, Iran secara resmi membuka kembali perwakilannya di Arab Saudi pada 6 Juni 2023, yang merupakan tonggak sejarah dalam upaya memulihkan hubungan dan mengurangi ketegangan antara kedua negara terbesar di Kawasan Timur Tengah. Dengan dibukanya kembali kedutaan, diharapkan akan memfasilitasi perjalanan lintas negara dan memperkuat upaya untuk mengembangkan penerbangan langsung, meningkatkan perdagangan, serta memperbaiki relasi bisnis (Detiknews, 2023). Langkah ini juga membuka pintu bagi jemaah haji Iran untuk lebih mudah mengajukan visa Saudi guna

melakukan ibadah haji dan umrah ke Mekkah setelah hubungan kembali normal sepenuhnya (Batrawy, 2023).

### **Proses Tiongkok Sebagai Mediator**

Pada 10 Maret 2023, Arab Saudi dan Iran mengumumkan bahwa mereka akan kembali memulihkan hubungan diplomatik resmi. Mediasi antara Arab Saudi- Iran dengan mediasi China diumumkan secara resmi di Beijing, kabar ini mengguncang dunia internasional. Sebagai hasil dari mediasi, Arab Saudi dan Iran sepakat untuk membangun kembali hubungan diplomatik yang telah memudar dengan kembalinya kedutaan dan konsulat masing-masing negara dalam dua bulan ke depan (Hendry, 2023). Keberhasilan ini dilihat dari bagaimana proses mediasi yang dilakukan Tiongkok dengan menginisiasi ruang dialog antara Iran dan Arab Saudi. Hal ini penting dilakukan sebagai wadah untuk saling berbagi pandangan, kepentingan, dan kekhawatiran mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, Xi Jinping melawat ke Arab Saudi dalam pertemuan pertama antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Arab Saudi pada bulan Desember 2022 dalam rangka KTT Pertama Dewan Kerja Sama Tiongkok-Teluk (GCC) pada tanggal 9 Desember. Di forum tersebut Xi Jinping menyampaikan pidato utama yang menekankan pentingnya meningkatkan solidaritas dan saling percaya politik antara Tiongkok dan anggota GCC, serta menegaskan dukungan yang kuat terhadap masing-masing (Jash, 2023). Selain itu hasil dari lawatan tersebut Tiongkok dan Arab Saudi menyepakati 35 Perjanjian Investasi Strategis senilai US\$ 30 Milyar. Investasi tersebut meliputi berbagai bidang diantaranya energi hijau, teknologi, layanan cloud, transportasi, logistik, industri medis, konstruksi dan manufaktur juga tercakup dalam kesepakatan, seperti proyek petrokimia, pembangunan perumahan dan pengajaran bahasa Cina (Tribunnews, 2023). Kunjungan ini tentu memiliki makna yang mendalam antara Tiongkok dan Arab Saudi, apalagi diberitakan dalam banyak media bahwa penyambutan super mewah Xi Jinping oleh Putra Mahkota MBS disebut mengalahkan sambutan terhadap Joe Biden waktu mengunjungi Riyadh di tahun yang sama. Sehingga dalam hal ini Tiongkok mendapatkan posisi khusus dalam Kerajaan Arab Saudi saat ini.

Nampaknya kedekatan ini dipahami betul oleh Xi Jinping, Sehingga pada Februari 2023 ketika Presiden Iran Ebrahim Raisi mengunjungi Tiongkok, Xi Jinping menyampaikan pesan dari Riyadh bahwa ketertarikan bernegosiasi dengan Teheran, sebagaimana yang disampaikan otoritas Juru bicara Kementerian luar negeri China.

"China dan Iran menikmati persahabatan yang kuat, merupakan pilihan strategis kedua belah pihak untuk mengkonsolidasikan dan mengembangkan hubungan antara China-Iran" kata Wang.

Beijing ingin "memainkan peran konstruktif dalam meningkatkan persatuan dan kerja sama negara-negara di Timur Tengah dan mempromosikan keamanan dan stabilitas kawasan," ucapnya lagi. (Kompas, 2024)

Meski tidak menyebut pesan Arab Saudi secara eksplisit namun pernyataan Kemu Tiongkok mencerminkan sebuah diplomasi senyap bahwa Tiongkok mendukung Kawasan Timur Tengah yang kondusif saling menghargai kedaulatan satu sama lain. Tidak lama setelah itu sebagai lanjutan dari proses mediasi yang dilakukan Tiongkok setelah melawat ke Arab Saudi, dan Mengundang Presiden Iran dalam waktu yang dekat, Tiongkok melakukan langkah-langkah praktis untuk membangun kepercayaan antara Iran dan Arab Saudi. Pada tanggal 25 Februari 2023, Tiongkok mengatur pertukaran

kunjungan diplomatik tingkat tinggi antara kedua negara, di mana para pejabat senior bertemu dan membahas secara langsung isu-isu yang menjadi sumber konflik. Selanjutnya, Tiongkok memfasilitasi dialog informal antara perwakilan dari Iran dan Arab Saudi di konferensi internasional yang dihadiri oleh kedua negara pada tanggal 1 Maret 2023. Di acara ini, Tiongkok memperkenalkan platform untuk diskusi santai dan tidak resmi, di mana para perwakilan dapat bertemu secara informal, berbagi pandangan mereka, dan mencari titik kesamaan. Pendekatan ini membantu menciptakan suasana yang lebih terbuka dan santai, memungkinkan kedua belah pihak untuk berinteraksi secara lebih akrab dan membangun kepercayaan satu sama lain secara bertahap (Gallagher, Hamasaeed, & Nada, 2023).

Puncaknya pada 6 Maret 2024 Tiongkok mengundang Arab Saudi dan Iran merundingkan beberapa isu penting. Negosiasi yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran di Beijing berlangsung selama empat hari. Langkah Tiongkok ini perlu dicermati bagaimana Tiongkok bisa meyakinkan untuk kedua negara berunding secara konstruktif dengan tujuan mencapai Kawasan timur tengah yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hasilnya pada 10 Maret 2024 Arab Saudi dan Iran sepakat untuk menormalisasi dan mempromosikan kembali perjanjian yang sudah ditandatangani antara kedua negara tersebut (Davina, 2023). Kesepakatan Arab Saudi-Iran yang merupakan hasil dari mediasi Tiongkok, dapat diinterpretasikan sebagai wujud konkret dari persepsi Tiongkok mengenai keamanan global. Dengan demikian, upaya mediasi Tiongkok dalam konflik Timur Tengah dapat dipandang sebagai bagian dari persaingan kekuatan besar antara Beijing dan Washington. Lebih khusus lagi, mediasi Tiongkok dalam kesepakatan antara Arab Saudi- Iran dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan dengan kesepakatan internasional lainnya yang difasilitasi oleh AS, seperti Kesepakatan Abraham yang menormalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab, serta Perjanjian Camp David yang mengakhiri konflik antara Mesir dan Israel (Jash, 2023). Hal ini senada dengan yang disampaikan pemimpin tertinggi Tiongkok Xi Jinping dalam Penutupan Acara Kongres Rakyat Nasional bahwa Tiongkok akan berpartisipasi aktif dalam reformasi sistem pemerintahan dunia. Negeri tirai bambu mendukung inisiatif keamanan global dan menyatakan ambisinya untuk menggantikan peran Amerika Serikat sebagai pembawa damai dunia (Hendry, 2023).

### **Keuntungan Nasional Tiongkok**

Beberapa tahun terakhir Tiongkok telah mengembangkan hubungan ekonomi dan politik yang erat dengan Riyadh dan Teheran. Bagi China, Iran merupakan partner penting yang menyediakan gas alam untuk menjalankan roda perekonomian China (Abdullah, 2021). Misalnya Arab Saudi merupakan pemasok minyak terbesar bagi Tiongkok, dengan perdagangan antara keduanya mencapai \$87 miliar pada tahun 2021. Sementara itu, perdagangan antara Iran dan Tiongkok bernilai lebih dari \$16 miliar pada tahun yang sama, dengan Teheran bergantung pada Tiongkok untuk sekitar 30% dari total perdagangan luar negerinya. Tiongkok juga berkomitmen untuk menginvestasikan \$400 miliar di Iran dalam jangka waktu 25 tahun (Yang, Iran- Saudi deal: China's growing clout in the Middle East, 2023).

Tidak hanya terbatas dengan Iran dan Arab Saudi, kepentingan Tiongkok juga terkait dengan hubungan komersialnya, termasuk energi, perdagangan, dan investasi di Kawasan ini. Pada pertengahan 2019, Tiongkok telah menandatangani perjanjian dengan 21 negara MENA (termasuk 18 negara Arab) dalam rangka proyek bersama Belt and Road Initiative (BRI). Ambisi Tiongkok untuk mengintegrasikan MENA ke dalam BRI, baik untuk alasan ekonomi maupun strategis, telah meningkatkan keterlibatannya dengan kawasan tersebut. Terakhir, Tiongkok memiliki kepentingan diplomatik di

MENA, yang terlihat dari dukungan Liga Arab pada tahun 2016 dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, mendukung pendekatan bilateral dalam menyelesaikan perselisihan, dan mengurangi keterasingan Tiongkok di Asia Tenggara setelah pengadilan menolak klaimnya atas sengketa tersebut. Untuk menjaga semua kepentingan ini, Tiongkok mengandalkan empat strategi, yaitu diplomasi mediasi, perluasan kemitraan politik dengan negara-negara MENA penting, pengerahan pasukan penjaga perdamaian, dan memperdalam kerja sama ekonomi (Lons, Fulton, Sun, & Al-Tamimi, 2019).

Sebagai negara dengan peran ekonomi dan politik yang semakin meningkat di Kawasan timur tengah, Tiongkok menyadari bahwa ketegangan antara Arab Saudi dan Iran dapat mengganggu sumber daya energi, jalur perdagangan, dan keamanan di kawasan tersebut. Selain itu peran aktif Tiongkok sebagai mediator juga didorong oleh kepentingan strategis lainnya (Shaher, 2023). Diantaranya pertama, Tiongkok ingin memperlihatkan dirinya sebagai pelindung perdamaian global, dengan mengandalkan sejarahnya yang tidak melibatkan masa kolonial, sehingga menciptakan citra positif di mata dunia internasional. Kedua, kepentingan ekonomi yang signifikan antara Tiongkok dengan kedua negara tersebut tercermin dalam berbagai perjanjian ekonomi besar. Misalnya, selama kunjungan Presiden Tiongkok ke Arab Saudi, berbagai perjanjian ekonomi penting telah ditandatangani, sementara di sisi lain, Tiongkok juga telah menyepakati perjanjian strategis jangka panjang dengan Iran yang berlaku selama 25 tahun. Selain itu, untuk menjamin operasi produksi yang lancar di dalam negeri, Tiongkok berupaya memastikan aliran minyak yang berkelanjutan dari Timur Tengah. Ketiga, dalam menghadapi ancaman yang datang dari Amerika Serikat, Tiongkok berusaha menjalin hubungan strategis yang lebih kuat dengan negara-negara utama di dunia, khususnya Rusia, Iran, dan Arab Saudi. Upaya-upaya ini memperlihatkan betapa kompleksnya motivasi Tiongkok dalam memainkan peran sebagai mediator di kawasan tersebut.

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas betapa pentingnya peran Tiongkok dalam memfasilitasi hubungan antara Saudi dan Iran. Tiongkok menunjukkan strategi diplomasi yang cermat. Pertama, Tiongkok mengutamakan netralitasnya terhadap Saudi dan Iran, tanpa memihak kepada salah satu pihak, karena keduanya adalah mitra strategisnya. Kedua, Tiongkok berusaha menandingi dominasi AS di Timur Tengah yang mengganggu kepentingan keamanan Beijing. Dengan memperkuat hubungan dengan Saudi dan Iran, Tiongkok secara efektif mengendalikan dua kekuatan utama di wilayah Teluk Persia, yang tidak dimiliki oleh AS karena hubungan buruknya dengan Iran. Ketiga, Tiongkok mendorong keberhasilan proyek Belt and Road Initiative (BRI) di kawasan MENA. BRI merupakan inisiatif mega Tiongkok untuk mempengaruhi perekonomian dan pasar global. Melalui mediasi ini, Tiongkok dapat memperkuat kehadirannya dalam sektor ekonomi, perdagangan, dan investasi di Timur Tengah tanpa harus khawatir terhadap campur tangan AS di wilayah tersebut.

### **Kesimpulan**

Hubungan antara Arab Saudi dan Iran, yang telah mengalami dinamika konflik selama lebih dari empat dekade, berhasil memasuki fase normalisasi pada Maret 2023 berkat mediasi yang dipimpin oleh Tiongkok. Ketegangan historis kedua negara disebabkan oleh perbedaan ideologi politik, perebutan pengaruh di Timur Tengah, serta campur tangan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Namun, melalui diplomasi aktif dan pendekatan konstruktif, Tiongkok berhasil memfasilitasi dialog yang menghasilkan kesepakatan untuk memulihkan hubungan diplomatik. Kesepakatan ini ditandai dengan pembukaan kembali kedutaan besar di Teheran dan Riyadh, serta komitmen kerja sama

di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan budaya. Peran Tiongkok sebagai mediator mencerminkan kebijakan luar negeri yang tidak biasa, mengingat fokus tradisional Tiongkok pada isu ekonomi. Keberhasilan ini tidak lepas dari hubungan strategis Tiongkok dengan kedua negara, yaitu melalui kerja sama energi dengan Arab Saudi dan kemitraan strategis jangka panjang dengan Iran. Selain itu, kepentingan strategis Tiongkok mencakup menjaga stabilitas Timur Tengah untuk mendukung proyek Belt and Road Initiative (BRI) serta memastikan kelangsungan pasokan energi. Mediasi Tiongkok ini tidak hanya memperkuat posisinya di Timur Tengah tetapi juga menunjukkan ambisi Beijing untuk menandingi dominasi Amerika Serikat dalam geopolitik global. Dengan menjaga netralitas dan memainkan peran sebagai penjaga perdamaian, Tiongkok berhasil memperkuat pengaruhnya secara diplomatik dan ekonomi, sekaligus menciptakan citra positif sebagai kekuatan besar yang berkomitmen terhadap stabilitas kawasan. Upaya ini menegaskan transformasi Tiongkok menjadi aktor global yang semakin aktif dalam isu-isu internasional strategis.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, M. F. (2019). *Kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran pasca mundurnya Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* [Skripsi, Universitas Komputer Indonesia]. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1929/>
- Abdul, Q., & Karam, Z. (2020, January 2). The US kills Iran's most powerful general in Baghdad airstrike. *AP News*. <https://apnews.com/article/ap-top-news-tehran-international-news-iraq-ali-khamenei-5597ff0f046a67805cc233d5933a53ed>
- Abdullah. (2021, Juni). Analisis perubahan kebijakan luar negeri Iran menyepakati JCPOA pada masa pemerintahan Hassan Rouhani. *Jurnal IC-MES*, 5(1). <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i1.91>
- Aprilia, Z. (2023, March 11). Terungkap! Ada China dibalik rujuknya Iran dan Arab Saudi. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230311195859-4-420887/terungkap-ada-china-dibalik-rujuknya-iran-arab-saudi>
- BBC News Indonesia. (2016, January 4). BBC News Indonesia. Retrieved May 12, 2023, from [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160103\\_dunia\\_saudi\\_iran\\_diplomatik](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160103_dunia_saudi_iran_diplomatik)
- BBC News Indonesia. (2016, January 5). Tujuh hal tentang permusuhan Iran dan Arab Saudi. Retrieved December 12, 2023, from [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160105\\_dunia\\_iransaudi\\_musuh](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160105_dunia_iransaudi_musuh)
- Bernard Orr, & Yaakoubi, A. E. (2023, April 6). Top Iranian, Saudi envoys meet in China in restoration of diplomatic ties. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/foreign-ministers-iran-saudi-meet-china-2023-04-06/>
- CNBC Indonesia. (2019, April 30). Seberapa dalam efek sanksi AS terhadap Iran? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430105659-4-69631/seberapa-dalam-efek-sanksi-as-terhadap-iran>
- CNN Indonesia. (2023, Februari 15). *Xi Jinping Pamer China-Iran Makin Mesra saat Jamu Presiden Raisi* Baca artikel CNN Indonesia "Xi Jinping Pamer China-Iran Makin Mesra saat Jamu Presiden Raisi. CNN. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230214192828-113-913052/xi-jinping-pamer-china-iran-makin-mesra-saat-jamu-presiden-raisi>
- Diasih, C. V. P. (2022). *Strategi Iran menghadapi sanksi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2010–2020* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/33462/>

- DW. (2019, October 25). Ekonomi Iran merosot tajam di bawah sanksi AS. *DW Indonesia*. <https://www.dw.com/id/ekonomi-iran-merosot-tajam-di-bawah-sanksi-as/a-50969322>
- DW. (2020, July 31). Mata uang tidak laku, Iran kesulitan impor bahan pangan. *DW Indonesia*. <https://www.dw.com/id/mata-uang-tidak-laku-iran-kesulitan-impor-bahan-pangan/a-54391886>
- Fahham, A. M., & Kataatmaja, A. M. (2014). Konflik Suriah: Akar masalah dan dampaknya. *Jurnal Politica*, 5(1), 37–60. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/332>
- Farid, M., & Lovely, C. (2023, April 12). Menelisik hubungan segitiga, China, Iran, dan Arab Saudi. *Forum Sinologi Indonesia*. <https://forumsinologi.id/hubungan-segitiga-china-iran-arab-saudi/>
- Figuroa, W. (2023, March 24). Iran-Saudi normalization: A regional process with Chinese characteristic. *Foreign Policy Research Institute*. <https://www.fpri.org/article/2023/03/iran-saudi-normalization-a-regional-process-with-chinese-characteristics/>
- Herlianto, M. K. (2022). *Peran Arab Saudi dan Iran pada konflik di Yaman yang menyebabkan krisis kemanusiaan pada tahun 2018* [Skripsi, Universitas Nasional]. <http://repository.unas.ac.id/5440/>
- Ilmu Demografi. (2018, January 23). Perekonomian Arab Saudi dan penjelasannya. *IlmuGeografi.com*. <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/perekonomian-arab-saudi>
- Irawan, D. (2021). Dinamika keamanan kawasan Timur Tengah dalam persaingan kekuatan Iran dan Amerika Serikat. *Journal Dauliyah*, 6(2), 221–248. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/6593>
- Islamic Republic News Agency. (2015, October 18). EU officially announces October 18 adoption day of JCPOA. *IRNA English*. <https://en.irna.ir/news/81804426/EU-officially-announces-October-18-adoption-day-of-JCPOA>
- Jash, A. (2023, June 23). Saudi-Iran deal: A test case of China's role as an international mediator. *Georgetown Journal of International Affairs*. <https://gija.georgetown.edu/2023/06/23/saudi-iran-deal-a-test-case-of-chinas-role-as-an-international-mediator/>
- Joyner, D. (2016). *Iran's nuclear program and international law: From confrontation to accord*. Oxford University Press.
- Kamaliya, I. (2020). *Kompleksitas keterlibatan aktor eksternal dalam konflik Yaman* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/68220/>
- Krismayanti, R. V. (2023). *Keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada masa pemerintahan Donald Trump* [Skripsi, Universitas Jember]. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/112228>
- Lamont, C. (2015). *Research methods in international relations*. Sage Publications.
- Lons, C., Fulton, J., Sun, D., & Al-Tamimi, N. (2019). *China's great game in the Middle East*. European Council on Foreign Relations. [https://ecfr.eu/publication/china\\_great\\_game\\_middle\\_east/](https://ecfr.eu/publication/china_great_game_middle_east/)
- Maulana, M. S. (2018). Persaingan kekuatan Saudi Arabia (Sunni) dan Iran (Syiah) pada konflik kontemporer (Suriah dan Yaman). *Jurnal Gama Societa*, 2(2), 101–109. <https://doi.org/10.22146/jgs.48867>
- Mustafa, A. Z. (2023, Desember). Rekonsiliasi Arab Saudi dan Iran dalam Perspektif Konstruktivisme. *Jurnal Review Politik*, 13(II), 260. <https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.2.253-277>
- Mustahyun. (2017). Rivalitas Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah pada Arab Spring Suriah tahun 2011–2016. *Journal of Islamic World and Politics*, 1(1), 90–110. <https://doi.org/10.18196/jiwp.1105>

- Nurrochim, A. N. (2021). *Kepentingan geopolitik Iran dalam konflik di Suriah tahun 2016–2020* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3992/>
- Pakar, M. N. (2022, December 9). Arab Saudi dan China tandatangani 35 kesepakatan selama kunjungan Xi Jinping. *Serambinews*. <https://aceh.tribunnews.com/2022/12/09/arab-saudi-dan-china-tandatangani-35-kesepakatan-selama-kunjungan-xi-jinping>
- Prasetyo, A. B. (2016). Implikasi pemutusan diplomatik Saudi Arabia dengan Iran pasca eksekusi mati Sheikh Nimr Al-Nimr. *Diponegoro Law Journal*, 5(3). <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12585>
- Rafsanjani, M. N. (2022). Potensi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran tahun 2016–2020. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 10(2). <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/08/eJournal-Rafsanjani.pdf>
- Rahmadanti, S. A. (2021). *Efektivitas penerapan sanksi ekstrateritorial Amerika Serikat terhadap sektor minyak Iran pada 2018–2019* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60604>
- Republika.co.id. (2023, March 17). Perdamaian di Yaman makin dekat? *Republika.id*. <https://www.republika.id/posts/38612/perdamaian-di-yaman-makin-dekat>
- Said, S., Kalin, S., & Faucon, B. (2023, Maret 12). *China Plans New Middle East Summit as Diplomatic Role Takes Shape*. Retrieved April 19, 2024, from The Wall Street Journal: <https://www.wsj.com/articles/china-plans-summit-of-persian-gulf-arab-and-iranian-leaders-as-new-middle-east-role-takes-shape-357cfd7e>
- Shine, S., Guzansky, Y., & Shavit, E. (2023). Iran and Saudi Arabia Renew Relations. Institute for National Security Studies. <https://www.inss.org.il/publication/iran-saudi-arabia-2/>
- Sinaga, R. M. (2018). Kepentingan Iran dan Indonesia dalam Kerjasama Minyak dan Gas tahun 2016. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(3).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tempo.co. (2019, May 21). Iran membantu Houthi, hadapi Arab Saudi di Yaman. *Tempo Fokus*. <https://fokus.tempo.co/read/1207728/iran-membantu-houthi-hadapi-arab-saudi-di-yaman>
- Tjandra, F. L. (2018). *Respon Iran dalam menghadapi ancaman kepentingan nasionalnya terkait konflik di Suriah 2011–2017* [Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan]. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8371>
- United States Institute of Peace. (2023, June 6). Iran and Saudi Arabia restore ties. *The Iran Primer*. <https://iranprimer.usip.org/blog/2023/mar/10/iran-and-saudi-arabia-restore-ties>
- VOA Indonesia. (2022, May 10). Presiden Iran: Ekspor minyak naik dua kali lipat dibanding Agustus 2021. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-iran-ekspor-minyak-naik-dua-kali-lipat-dibanding-agustus-2021/6564925.html>
- Yang, W. (2023, March 16). Pengaruh Cina di Timur Tengah meningkat. *Deutsche Welle (DW)*. <https://www.dw.com/id/pengaruh-cina-di-timur-tengah-meningkat/a-65003091>